

Permainan Edukatif dan Kejahatan atas Anak-Anak

Oleh Dadang S. Anshori

Anak bukan milik orang dewasa, ia adalah anak bangsa yang harus menentukan masa depannya dengan tangannya sendiri. Oleh karena itu, segala bentuk intervensi dan reduksi destruktif orang dewasa bukan hanya merugikan nasib anak, namun juga nasib bangsa. Anak sebagai individu yang memiliki hak dan kewajiban sebagaimana orang dewasa kurang dilindungi secara yuridis. Inilah yang menyebabkan menjamurnya sikap semena-mena yang dilakukan orang dewasa terhadap anak-anak untuk berbagai kepentingan. Dalam banyak fenomena anak-anak menjadi korban “kekerasan” orang dewasa. Di antara mereka ada yang diperkosa dan dibunuh. Menjamurnya anak jalanan, juga akibat kekerasan dan tidak bertanggung jawabnya orang dewasa terhadap masa depan mereka. Demikian juga saat ini sekitar 2 juta anak sekolah harus mengalami putus sekolah karena tidak memiliki cukup biaya. Dalam konteks ini ada dua pertanyaan yang harus dijawab dengan segera. Pertama, bagaimana tanggung jawab orang dewasa (baca: orang tua) terhadap anak? Kedua, bagaimana usaha pemerintah dalam melindungi setiap hak anak yang diwujudkan dalam bentuk yuridis?

Dalam menjawab pertanyaan pertama, kita harus menyimak fenomena kemasyarakatan yang terjadi saat ini. Baru-baru ini ada sekitar puluhan anak tidak bisa melihat karena terkena pistol mainan yang ditembakkan ke mata mereka dan beberapa puluh orang lainnya harus menderita cacat mata. Siapa yang harus dipersalahkan dalam hal ini? Persoalan yang lebih lanjut tentu mempertanyakan tanggung jawab orang dewasa terhadap anak-anak. Menyiapkan permainan “kekerasan” merupakan indikator bahwa orang dewasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap masa depan anak-anak. Bagaimana mungkin anak-anak harus menjadi korban “bisnis” orang dewasa? Anak-anak kita menjadi terbiasa dengan permainan kekerasan karena mereka sering melihat di televisi dan di video games yang tersebar di sekitar mereka. Mereka juga ingin mempraktekan permainan tersebut melalui alat-alat yang sengaja dibuat dengan tujuan bisnis. Pistol mainan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai pistol sesungguhnya.

Tiap hari anak-anak kita dihadapkan pada situasi sosial yang stress. Mereka kehilangan masa mainannya yang kreatif dan tidak membahayakan. Dalam banyak peristiwa anak-anak menjadi korban perkosaan, perdagangan seks, bahkan diperkosa oleh orang tuanya. Mereka dibiarkan menanggung derita sepanjang hidupnya. Sementara di lain pihak kita saksikan anak-anak bercerita di layar televisi memperagakan orang dewasa dan melakukan gerakan sesuai dengan petunjuk orang dewasa, mereka sibuk dengan jadwal shooting bisnis iklan, mereka dihadapkan pada agenda bagaimana menjadi seorang artis-aktor yang populer dan bagaimana mereka mendapat pans yang banyak, mereka menyelenggarakan ulang tahun dengan biaya jutaan rupiah. Memang sejak kecil, kita sudah memisahkan mereka secara strata sosial, ada anak yang harus hidup di jalanan mengais rezeki dan hidup dibawah tekanan orang tuanya yang pemalas, miskin, dan tak bertanggung jawab. Di lain pihak kita menemukan anak yang “glamour” meskipun sama-sama diperkosa oleh para pemain bisnis. Seorang Joshua telah menjadi maniak bagi anak seusinya yang dipromosikan besar-besaran, baik melalui “Anak Ajaib” maupun “Kuis Joshua” beserta iklan-iklannya yang memanfaatkan bisnis kalangan anak-anak. Dari sini kita bisa melihat seberapa besar kadar tanggung jawab orang dewasa terhadap kehidupan anak-anak masa kini dan masa mendatang?

Dalam menjawab pertanyaan kedua, kita bisa lihat dari seberapa banyak produk hukum yang dikeluarkan pemerintah untuk melindungi hak anak-anak. Saat ini kita nyaris tidak memiliki perangkat hukum untuk anak-anak, bahkan baru dirancang dan hendak diajukan, sebagaimana disampaikan Meneg Pemberdayaan Wanita, Khafifah Indarparawansa. Sementara korban-korban terus berjatuhan di kalangan anak-anak. Siapa yang akan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang orang tuanya menjadi korban konflik bernuansa Sara di Maluku dan Mataram atau Aceh? Mereka telah menjadi korban zamannya karena tak satu pun perangkat perundang-undangan melindungi mereka. Tak ada yang menjamin sekolah mereka, kebutuhan hidup mereka apalagi masa depannya. Dan pemerintah dengan segala perangkatnya seakan tak berdaya menghadapi berbagai kenyataan tersebut. Sampai di sini kita membaca ukuran yang bagaimana yang harus diberikan kepada negara atas tanggung jawabnya terhadap anak-anak.

Melindungi Hak Anak

Melindungi anak berarti memberikan hak-hak mereka demi masa depannya yang selamanya ini dirampas banyak orang dewasa. Anak-anak harus terhindar dari berbagai bentuk kekerasan orang dewasa untuk kepentingan apa pun. Mereka harus mendapatkan kesempatan mempersiapkan masa depannya, seperti pendidikan. Bagaimana mungkin seorang anak akan mendapatkan kepastian masa depan apabila dia tidak menginjak bangku sekolah dan tidak pernah bergabung dengan temannya dalam satu strata lingkungan pendidikan. Baiklah kita urut saja fenomena yang terjadi saat ini sebagai bahan bandingan atau cerminan hak-hak anak mana saja yang dirampas orang dewasa.

Pertama, anak harus mendapatkan jaminan untuk mendapatkan pendidikan. Ini satu keniscayaan bagi kehidupan anak di masa mendatang. Era kompetisi yang didengungkan banyak kalangan memberikan berbagai konsekuensi yang harus dipersiapkan oleh siapa pun termasuk anak-anak kita. Pendidikan akan memberikan jaminan dan kepercayaan diri menghadapi abad kompetisi. Suatu ironis apabila di abad global ini, pendidikan masih menjadi permasalahan pokok. Mestinya pemerintah menyadari kepentingan masa depan ini melalui peningkatan pendidikan yang berkualitas. Dalam banyak kenyataan sejarah kehidupan anak-anak, di bidang pendidikan mereka selalu dikorbankan. Padahal mereka tak sedikit pun berkontribusi terhadap berbagai kerusakan sosial yang diderita selama ini. Krisis moneter yang berkepanjangan menelantarkan banyak anak untuk tidak bersekolah karena faktor biaya. Kerusuhan Sara di berbagai daerah yang menyebabkan ratusan ribu penduduk mengungsi juga menelantarkan anak-anak untuk tidak bersekolah karena kesulitan fasilitas belajar. Siapa yang memperhatikan semua itu? Andaikan berbagai pelanggaran HAM mulai diungkap di tengah masyarakat, mungkinkah pelanggaran tersebut tergolong ke dalam pelanggaran HAM anak-anak? Siapa yang bertanggung jawab dan siapa pula yang harus diadili atas kejahatan masa depan anak-anak tersebut?

Kedua, anak harus memiliki dunia yang secara alamiah sudah diberikan Tuhan. Ini juga hak mereka dalam kehidupannya. Berbagai bentuk pelanggaran terhadap masa perkembangan ini hendaknya dimasukkan pula dalam bentuk kejahatan terhadap anak-anak. Berapa kali anak mendapatkan cacian dan makian di sekolah, masyarakat dan keluarga yang menyebabkan mereka minder, rendah diri dan prustasi? Seorang pengamat pendidikan asal Amerika menyebutkan bahwa seorang anak lebih dari 100 kali mendapatkan teguran, tekanan, cacian, makian, bahkan pukulan yang menyebabkan

mereka selalu takut memasuki ruang belajar untuk berhadapan dengan guru-guru mereka. Mereka menjadi anak-anak yang tidak percaya pada kemampuannya sendiri. Di besarkan dalam kondisi ketakutan dan tidak percaya diri. Mereka juga hidup dalam doktrin-doktrin orang dewasa yang penuh prestise yang sama sekali tidak dimengerti oleh pikirannya. Lembaga pendidikan kita sekalipun, belum mampu memberikan yang dibutuhkan anak-anak kita. Lembaga pendidikan terikat dengan doktrin-doktrin yang sama sekali tidak dipahami oleh anak-anak kita. Bagaimana mungkin seorang anak diajari hidup ber-Pancasila sementara di sekitar mereka terjadi berbagai pelanggaran hukum.

Hingga kini, wajar sembilan tahun belum menjadi lembaga hukum yang memberikan jaminan terlaksananya hak anak-anak kita. Mereka tetap terlantar karena persoalan pendidikan bukan hanya komitmen dan program pemerintah, melainkan harus ada kesiapan ekonomis dari setiap warga negara. Di beberapa dunia maju, untuk mendapatkan pendidikan anak-anak dibebaskan dari segala tuntutan pembiayaan bahkan mereka diberikan beasiswa untuk kebutuhan selama pendidikan. Mereka menaruh perhatian yang besar pada anak-anak mereka agar lebih maju di masa mendatang. Mereka kerahkan seluruh potensi dan kemampuan negara agar anak bangsa di kemudian hari lebih maju dan bisa membangun negaranya. Di negara kita perhatian terhadap pendidikan hanya menjadi perhatian non-departemental yang dilakukan secara pastisipan oleh masyarakat. Usaha menjamin hak berpendidikan harusnya dilakukan pertama kali oleh negara.

Ketiga, anak-anak perlu mendapatkan tempat di masyarakat yang layak sesuai dengan dunianya. Anak-anak Indonesia saat ini dijadikan objek bisnis besar-besaran dalam berbagai produk, mulai dari permainan sampai narkoba. Orang dewasa mengarahkan objek bisnisnya pada anak-anak. Lihatlah berbagai iklan produk makanan anak-anak yang diperankan oleh anak-anak seusinya di layar televisi. Kehidupan mereka berada di bawah bayang-bayang rekayasa orang dewasa untuk kepentingan bisnis orang dewasa semata. Perhatikanlah siaran televisi kita, manakah siaran yang benar-benar mengandung aspek edukasi demi persiapan anak-anak di masa mendatang. Mereka disajikan dan dipersiapkan pada popularitas dan hidup glamaur yang sama sekali tidak dipahaminya. Mereka dibuat begitu rupa melakukan gerakan-gerakan orang tua.

Masyarakat kita tidak memberikan sumultansi pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Mereka bahkan dihadapkan pada ironi-ironi yang kontradiktif. Mereka dibingungkan dengan sikap-sikap paradoksal. Secara keseluruhan, masyarakat kita belum menunjukkan sikap tanggung jawabnya secara baik. Padahal di negara-negara maju yang liberal dan rentan dengan nilai tradisi, etika, dan agama, anak-anak diproteksi dari berbagai macam pengaruh luar (masyarakat) yang bisa merusak psikologis dan masa depan mereka. Ibu-ibu di Barat mendiskusikan bagaimana caranya menjauhkan anak-anak mereka dari video games yang merajarela termasuk di negara kita. Bahkan di kita, anak-anak dibiarkan seharian bermian games karena tidak mengganggu pekerjaan orang tuanya. Anak-anak terbiasa dengan miniatur kekerasan, perkosaan, dan pembunuhan yang ditampilkan di layar video games dan dalam realitas mereka mencoba setiap prilaku yang mereka saksikan dari permainan tersebut. Permainan inilah yang mengilhami prilaku-prilaku destruktif yang ada dalam masyarakat kita.

Maka semua pihak perlu mencari permainan yang edukatif dan bermanfaat, tidak membahayakan secara fisik atau psikis pada anak-anak kita. Demikian pula perlu dibatasi

berbagai jenis permainan yang jelas-jelas tidak mendidik bagi anak-anak. Bukankah itu sebuah kejahatan?***

Dadang S. Anshori, dosen Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung.